

EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAKU USAHA PERTANIAN PADA SUMBER PERMODALAN DI PEDESAAN

(The Existence of Micro Finance Institutions in Enhancing The Accessibility of Capital to Agribusiness Actors)

Ananti Yekti dan Amie Sulastyah

ABSTRACT

The study was conducted to identify: 1) the variety of farmers and sources of funds in the agriculture sector; 2) credit sources accessible to farmers; 3) the intensity of relations and effectiveness of fund utilization; 4) the scheme characteristics/credit models preferred by farmers. The study was conducted from March to August 2009, in Piyungan, Yogyakarta. Data was analyzed descriptively. The study result showed that 100% of the rural community have taken loans from informal financing institutions namely Lembaga Keuangan Bukan Bank Bukan Koperasi (Non Bank Non-Cooperatives Financing Institutions), while only 50.2% (26.9% from banks, 20% from cooperatives and 3.3% from mortgage institutions). The total of credit taken ranges from Rp. 150,000 to Rp. 20,000,000. Informal financing institutions provide credits in small amount, while banks provide larger loans. Micro-Finance Institutions were more preferred by those who are less bankable and less feasible. The loans were usually utilized to expand existing business (100%), to start other lines of business (30%), to cover the previous business loss (13.3%), and to cover household needs (16,7%).

Keywords: Micro Finance Institutions, accessibility, bankable

PENDAHULUAN

Berbagai program dan kebijakan yang membantu untuk tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah banyak dilakukan oleh pemerintah, namun kebijakan tersebut nampaknya belum mampu menyelesaikan masalah dan belum terlihat adanya akses usaha kecil terhadap lembaga keuangan. Sebagai karakteristik dari kebanyakan usaha kecil untuk dapat mengakses berbagai lembaga keuangan adalah adanya keterbatasan dari berbagai aspek seperti

agunan, informasi tentang kelayakan usaha, prosedur yang harus dilalui, yang menyebabkan usaha kecil selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal (perbankan) dibanding usaha skala menengah dan besar. Kondisi inilah yang memungkinkan semakin berkembangnya lembaga keuangan informal di pedesaan.

Berbicara masalah permodalan dalam pertanian tidak bisa lepas dari masalah kredit, karena kredit tidak lain adalah modal pertanian yang diperoleh dari pinjaman. LKM

pertanian memiliki peranan strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakatan tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum. Di lingkungan masyarakat, telah banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyediakan skim kredit dengan pola yang beragam, namun umumnya bergerak dalam fasilitasi pembiayaan non pertanian.

Krisnamukti (2003) menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan mikro, hampir seluruh rumah tangga miskin akan tergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak maupun pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan memanfaatkan peluang dari pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut sangat penting untuk menjawab bagaimana memperluas akses-akses pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dan pada saat yang sama peranan LKM dapat terus berkembang sekaligus menjawab kebutuhan usaha mikro dan kecil walaupun porsinya masih terbatas.

Kecamatan Piyungan merupakan salah satu sentra produksi pertanian terutama untuk tanaman pangan, sayuran dan ternak. Sebagian besar penduduk di wilayah kecamatan Piyungan hidup dengan mata pencarian sektor pertanian, industri kecil,

perdagangan dan jasa. Sebagaimana kawasan yang didominasi dengan wilayah pedesaan, kecamatan Piyungan adalah kawasan yang identik dengan masyarakat pertanian tradisional dengan masalah-masalahnya. Keberadaan lembaga keuangan juga masih terbatas, meskipun telah ada beberapa lembaga keuangan mikro, namun keberadaan lembaga ini belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi di daerah tersebut.

Banyak lembaga keuangan dengan berbagai bentuk kredit ditawarkan pada petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu. Keberadaan lembaga keuangan ini, baik formal maupun informal memegang peranan penting dalam perkembangan usaha mikro dan kecil. Untuk itu perlu kiranya dikaji atau dianalisis seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan ini berkontribusi terhadap usaha mikro dan kecil di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui keragaan petani kreditur dan sumber permodalan untuk sektor pertanian 2) Mengidentifikasi berbagai sumber-sumber kredit yang diakses oleh petani di pedesaan 3) Mengetahui intensitas hubungan dan efektifitas penggunaan modal 4) Mengidentifikasi karakteristik skim / model kredit yang diharapkan oleh petani.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 2 katagori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. Di lapangan teridentifikasi tiga

katagori bentuk LKM yang berkembang, yaitu : LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi. Masing-masing LKM memiliki karakteristik yang berbeda. Pola operasi LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/konvensional, LKM koperasi menerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank bukan Koperasi pola operasionalnya beragam. Dalam perkembangannya lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena dikalangan pelaku usaha mikro dan kecil karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun pada keluwesan pencairan kredit. Hal ini merupakan indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Menurut Wijoyo (2005) LKM di masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk formal dan non formal dengan karakteristiknya masing-masing.

Meski banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan UMKM, namun banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses sumber permodalan tersebut. Kredit perbankan juga sulit diakses

diantaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UKM yang belum *bankable*. Terlebih Bank Indonesia tidak lagi membantu usaha kecil dalam bidang permodalan secara langsung dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Donabedian,s dalam www.wikipedia.org memberikan batasan tentang aksesibilitas sebagai berikut : *“accessibility is considered to be something beyond the mere presence or availability of resources at given time and place. It includes the characteristics of the resource that facilitate clients, supplier’*. Bila diartikan aksesibilitas dapat dianggap sebagai sesuatu yang diluar keberadaan atau availibilitas (ketersediaan) dari sumberdaya dalam waktu dan tempat yang tepat. Termasuk karakteristik dari sumber-sumber yang memberikan peluang atau kendala yang dirasakan oleh klien (pelanggan).

Hasan dalam Effendi (1986) dalam Damandiri (2009) mengemukakan dalam kerangka konseptualnya untuk menelaah lebih jauh tentang aksesibilitas pada pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan yang lebih holistik, adalah : bahwa masalah akses itu didalamnya mencakup tiga dimensi, yaitu : 1) kognitif , 2) perilaku dan 3) birokrasi administratif (institusional). Sebab itu struktur sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketiga dimensi tersebut, untuk itulah setiap usaha dalam memperbaiki akses pada

pelayanan publik harus juga mengembangkan kerangka konseptual maupun strategi yang mencakup ketiga dimensi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey yang bersifat analisis deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1988). Sedangkan menurut Kazmier dalam Maryati, 2001 penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi. Penelitian dilakukan pada 31 Maret 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009. Lokasi penelitian adalah kecamatan Piyungan, kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakteristik sampel yang dipilih adalah : 1) memiliki usaha dibidang pertanian 2) menjadi anggota kelompok tani mitra STPP Jurusan Penyuluhan Pertanian 3) memiliki pinjaman pada minimal satu lembaga keuangan. Jumlah sampel ditetapkan sejumlah 30 sampel. Wilayah penelitian ditentukan secara purposive, yaitu kecamatan Piyungan sedangkan penentuan desa lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu desa Sri Martani, desa Karang Ploso. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara dan dokumenter.

Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan tujuannya. Untuk mengetahui keragaan petani kreditur dan sumber permodalan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui sumber-sumber permodalan yang paling banyak dapat diakses pelaku usaha pertanian di pedesaan dilakukan dengan tabulasi tunggal dan silang. Untuk mengetahui karakteristik skim / model kredit yang diharapkan oleh petani diuraikan menurut hasil interpretasi data tabulasi. Untuk mengetahui intensitas hubungan dan efektifitas penggunaan modal dilihat dari jumlah nasabah peminjam, besarnya pinjaman dan pemanfaatan pinjaman.

PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Usia responden paling muda adalah 31 tahun, sedangkan yang tertua adalah 70 tahun. Meski ada responden yang melewati batas usia produktif tenaga kerja, namun pada kenyataannya mereka masih melakukan usahatani, pemeliharaan ternak dan dagang. Dalam hal ini usia tidak menjadi hambatan dalam mengakses lembaga sumber kredit.

Mayoritas tingkat pendidikan responden adalah sederajat dengan SLTA (40%). Sedangkan urutan kedua diduduki oleh tingkat pendidikan SD dan SLTP, masing-masing 26,7% dan yang paling sedikit adalah D-3 dan S-1, masing-masing sebesar

3,3%. Memperhatikan komposisi pendidikan yang ada, maka sesungguhnya memiliki potensi bahwa responden akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencari informasi tentang lembaga sumber kredit khususnya yang bergerak dibidang pertanian. Karena salah satu dimensi yang dibutuhkan untuk terjadinya akses adalah dimensi pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang sumberdaya yang dibutuhkan dan bagaimana memperoleh sumberdaya tersebut.

Seluruh responden minimal mengikuti satu kelompok atau organisasi di lingkungannya. Dan komposisi ini yang merupakan mayoritas ada di wilayah penelitian berdasar data yang berhasil

dikumpulkan, yaitu mencapai 50%. Urutan kedua diduduki oleh orang yang mengikuti dua jenis kelompok (36,7%). Jumlah kelompok tani/organisasi yang paling banyak diikuti oleh seorang responden adalah tujuh buah kelompok/organisasi. Organisasi kelompok yang paling banyak diikuti oleh responden berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada ditingkat desa, diikuti oleh kelompok tani/kelompok ternak. Dari berbagai kelompok atau organisasi yang diikuti oleh responden, ada yang berperan sebagai anggota saja dan ada pula yang menjadi pengurus. Data tentang distribusi kenggotaan responden dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kedudukan Responden pada Berbagai Kelompok atau Organisasi Yang Diikuti

No.	Kedudukan dalam Kelompok	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pengurus	3	10
2	Pengurus dan anggota	7	23,3
3	Anggota	20	66,7
	Total	30	100

Sumber : Olahan data primer, 2009

Dari tabel 1 diketahui bahwa mayoritas (67%) responden dalam organisasi atau kelompok yang diikuti berperan sebagai anggota, sedangkan 10% berperan sebagai pengurus disemua kelompok atau organisasi yang diikuti. Sedangkan sisanya sebesar 23% menjadi pengurus pada kelompok tertentu dan sekaligus menjadi anggota di kelompok yang lainnya. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah penelitian mempunyai

beberapa orang yang dianggap mempunyai pengaruh di lingkungannya, sehingga keberadaan mereka umumnya menjadi panutan, penggerak dan motivator pada berbagai organisasi atau kelompok yang ada dan diikuti.

Apabila ditelaah lebih lanjut, mereka yang selalu menjadi pengurus pada berbagai kelompok atau organisasi adalah orang-orang yang memiliki akses terbanyak pada berbagai

lembaga sumber kredit, baik yang berupa perbankan maupun LKM. Ini menunjukkan bahwa dimensi perilaku, dalam hal ini kemampuan berkomunikasi, pola perilaku dan keberhasilan peranan memberikan kontribusi penting bagi terselenggaranya akses pada sumberdaya tertentu.

B. Keragaan Lembaga Sumber Kredit Di Kecamatan Piyungan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 2 katagori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. Sumber kredit yang ada di Kecamatan Piyungan, setelah dilakukan identifikasi ada beberapa jenis. Di lapangan teridentifikasi tiga katagori bentuk LKM yang berkembang, yaitu : LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi. Masing-masing LKM memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk lebih

lengkapya berbagai Lembaga sumber kredit yang ada di kecamatan Piyungan dapat dilihat pada tabel 2.

Dari data pada tabel 2 diketahui bahwa dari berbagai lembaga sumber kredit ada beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi, yang dikenal dengan istilah LKM. Sesuai dengan definisinya, seluruh LKM yang ada di kecamatan Piyungan tidak ada yang berbadan hukum, sehingga jika merujuk pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan BPR, maka dengan sendirinya bank atau lembaga keuangan mikro yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR dianggap sebagai bank gelap (*illegal banking*) atau biasa disebut lembaga non formal. Pola operasi LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/konvensional,

Tabel 2. Karakteristik Lembaga Sumber Kredit Yang Diakses oleh Petani di Kecamatan Piyungan

No.	Jenis Lembaga Sumber Kredit	Badan Hukum	Dasar Pembentukan	Agunan	Lama Pinjam (bulan)	Tingkat bunga (%/tahun)	Jangkauan Pelayanan
A	Lembaga Formal						
	BPD kantor kas	PT	Akta	Perlu	60	18	Kabupaten
	BRI Unit Desa	PT	Akta	Perlu	60	24	Kecamatan
	Pegadaian	Perum	Akta	Perlu	4	11.4	Kecamatan
	KUD Tri Upoyo	Koperasi	Koperasi	Perlu	36	12	Kecamatan

	Koperasi Tani	Koperasi	Koperasi	Perlu	36	6	Kecamatan
	Koperasi Pasar	Koperasi	Koperasi	Perlu	36	12	Kecamatan
B	Lembaga Non formal						
	LKM	Tidak ada	SK. Kepala Desa	Tidak Perlu	12	12	Desa
	Unit S/P Gapoktan	Tidak ada	Dinas Pertanian	Perlu	10	12	Kecamatan
	Unit S/P Keltan & KWT	Tidak ada	Dinas Pertanian	Tidak perlu	36	6	Dusun
	BKM	Tidak ada	SK. Kepala Desa	Perlu	12	18	Kecamatan
	Pokmas	Tidak ada	SK. Kepala Desa	Tidak ada	12	12	Desa
C	Kredit Program						
	PKBL-Jamsostek	PT	Akta	Tidak perlu	36	6	Propinsi
	PKBL-Mandiri	PT	Akta	Perlu	36	6	Propinsi

Sumber : Olahan data primer, 2009

LKM koperasi menerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank bukan Koperasi pola operasionalnya beragam.

C. Aksesibilitas Masyarakat Pada Lembaga Sumber Kredit

Effendi (1986) dalam Damandiri (2009) yang menggunakan pendekatan aksesibilitas pada pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan yang lebih holistik

bahwa masalah akses itu didalamnya mencakup tiga dimensi, yaitu : 1) kognitif , 2) perilaku dan 3) birokrasi administratif (institusional). Sebab itu struktur sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketiga dimensi tersebut. Untuk itu penjabaran dan pembahasan aksesibilitas masyarakat pada lembaga keuangan mikro yang ada di pedesaan akan merujuk pada dimensi-dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya

Tabel 3. Aksesibilitas Petani Terhadap Lembaga Sumber Pembiayaan di Kecamatan Piyungan

No.	Sumber Pembiayaan	Total (orang)	Persentase (%)
1	Bank Umum (Nasional&Daerah)	8	26,9
2	Koperasi	6	20,0
3	Pegadaian	1	3,3
4	Lembaga Keuangan Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM)	30	100,0
5	Lainnya (saudara/teman/tetangga)	21	70,0

Sumber : Olahan data primer, 2009

Berdasar tabel 3 diketahui bahwa seluruh responden (100%) pernah berinteraksi dan mengakses pada jenis lembaga keuangan yang berupa lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi (dikenal dengan istilah LKM). Ini menunjukkan suatu fakta bahwa lembaga-lembaga keuangan mikro lebih mengena dikalangan pelaku usaha mikro dan kecil karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun pada keluwesan pencairan kredit. Hal ini merupakan indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Selain mengakses sumber kredit pada LKM, masyarakat ternyata juga meminjam pada sumber pembiayaan individu (perorangan) yaitu kepada

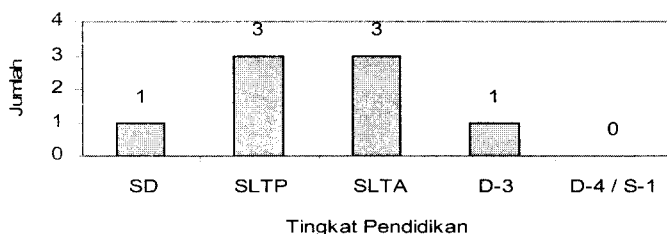
teman/tetangga/saudara, yaitu sebanyak 70%.

LKM yang ada di kecamatan Piyungan umumnya merupakan LKM yang didirikan secara swadana oleh masyarakat melalui organisasi / lembaga yang sudah ada, seperti Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, organisasi kemasyarakatan yang sudah ada maupun kelompok yang khusus didirikan dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan di bidang simpan pinjam saja. Ini sesuai dengan pendapat Wijoyo (2005) bahwa LKM di masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk formal dan non formal dengan karakteristiknya masing-masing. Namun LKM tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian.

Tingkat pendidikan bukan merupakan faktor penentu dalam keputusan

untuk mengakses suatu jenis lembaga keuangan. Ini dapat dilihat dari sebaran distribusi tingkat pendidikan responden

yang mempunyai akses kredit pada perbankan, seperti tersaji pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Distribusi Responden Yang Mengakses Perbankan Berdasar Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Jumlah Orang Yang Mempunyai Akses Pada Perbankan Berdasar Jumlah Kelompok Yang Diikuti

No.	Jumlah Kelompok Yang Diikuti (Buah)	Jumlah (orang)
1	2	4
2	4	1
3	5	1
4	6	1
5	7	1
	Total	8

Sumber : Olahan data primer, 2009

Berdasar pada gambar 1 dapat dilihat bahwa akses pada lembaga keuangan yang berupa perbankan dapat dilakukan oleh responden dengan berbagai tingkat pendidikan, mulai SD sampai dengan Diploma. Namun apabila dilihat dari data pada tabel 4 diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang mengakses lembaga keuangan berupa perbankan adalah orang-orang yang memiliki keikutsertaan tinggi dalam organisasi atau kelompok, dan memiliki kedudukan sebagai pengurus atau pengurus dan anggota dalam organisasi yang diikutinya. Dari sini dapat dilihat bahwa

dimensi perilaku, dalam hal ini kemampuan berkomunikasi, pola perilaku, dinamika transaksi sosial dan keberhasilan peran dalam masyarakat menjadi berperan dalam menudukung terselenggaranya aksesibilitas pada lembaga sumber kredit yang dipilih. Sehingga dalam hal ini tingkat pendidikan seseorang bukan merupakan faktor utama untuk dapat terjadinya aksesibilitas pada Perbankan, namun keikutsertaan dalam berbagai lembaga atau organisasilah yang justru dapat meningkatkan aksesibilitas pada lembaga keuangan Perbankan.

Tabel 5. Interaksi Responden pada Berbagai Jenis Lembaga Sumber Kredit

No.	Interaksi dengan macam sumber kredit (jenis)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1	16	53,3
2	2	11	36,7
3	3	1	3,3
4	4	0	0
5	5	2	6,7
	Total	30	100

Sumber : Olahan data primer, 2009

Maksud interaksi responden pada berbagai jenis lembaga sumber kredit adalah jumlah jenis/ragam lembaga sumber kredit yang diakses oleh satu orang responden. Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa ragam sumber kredit tertinggi yang diakses oleh satu orang responden adalah 5 jenis lembaga sumber kredit (6,7%). Sedangkan mayoritas responden (53,3%) hanya mampu mengakses

pada satu jenis lembaga sumber kredit. Apabila kondisi ini dikaitkan dengan tabel 6 mengenai tingkat pengetahuan responden pada berbagai lembaga keuangan sumber kredit yang cukup tinggi, serta tingkat pendidikan yang juga tinggi, maka sesungguhnya berpotensi untuk melakukan akses kepada berbagai lembaga sumber kredit.

Tabel 6. Sebaran Frekuensi Interaksi Responden Pada Satu Lembaga Sumber Kredit

No.	Frekuensi interaksi pada satu lembaga sumber kredit (kali)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1	15	50,0
2	2	17	56,7
3	3	7	23,3
4	4	4	13,3
5	5	4	13,3
6	6	2	6,67
7	7	0	0
8	8	1	3,3

Sumber : Olahan data primer, 2009

Maksud dari frekuensi interaksi pada satu sumber kredit adalah kekerapan seseorang melakukan interaksi pada suatu

lembaga sumber kredit tertentu. Merujuk pada tabel 6, mayoritas frekuensi interaksi seorang responden dengan lembaga sumber kredit

adalah dua kali, ini mencakup 56,7% responden. Interaksi paling tinggi mencapai delapan kali untuk satu lembaga keuangan, namun demikian kejadian tersebut hanya berlaku pada 3,3% responden saja. Memperhatikan data yang berhasil dikumpulkan diketahui mengapa frekuensi interaksi seseorang pada sumber kredit tertentu mayoritas pada satu atau dua kali adalah karena mereka cenderung untuk mencari modal usaha pada lembaga sumber kredit secara berganti-ganti. Apabila sudah mengambil disatu lembaga keuangan, umumnya untuk kebutuhan modal berikutnya

mereka akan mengambil di lembaga sumber kredit yang lainnya. Selain itu beberapa Lembaga keuangan yang ada di kecamatan Piyungan, khususnya LKM, baru eksist melakukan kegiatan penyediaan modal bagi usaha tani beberapa tahun belakangan ini. Sebelum tumbuh dan berkembang LKM, masyarakat melakukan penyediaan modal usahatani dengan cara meminjam secara pribadi pada teman, keluarga atau pelepas uang. Namun ada juga yang memenuhi kebutuhan modal usahanya dengan cara menggadaikan hasil panennya atau barang-barang yang dimiliki kepada pihak ketiga.

Tabel 7. Rentang Nominal Kredit Terendah yang Diakses Masyarakat Piyungan

No.	Nominal Terendah (Rp.)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Lembaga Sumber Kredit
1	150.000,-	3	10,0	LKM (Pokmas, Desa)
2	500.000,-	18	60,0	LKM (Pokmas, Poktan, Desa), Koppas
3	1.000.000,-	19	63,3	LKM (Poktan, Gapoktan, BKM, Desa), Koppas, Koptan

Sumber : Olahan data primer, 2009

Pada tabel 7 dapat dilihat besaran kredit terendah dan tertinggi yang pernah diambil oleh masyarakat di kecamatan Piyungan. Kredit terendah yang pernah diambil oleh responden adalah Rp.150.000,- (10%). sampai dengan Rp.1.000.000,-. Melihat dari sumber kredit yang diakses oleh masyarakat diketahui bahwa lembaga sumber kredit yang paling banyak diakses adalah lembaga sumber kredit yang berbentuk LKM,

diikuti oleh koperasi. Ini sesuai dengan pendapat Wijoyo (2005) bahwa LKM lebih mengena di pelaku usaha mikro dan kecil karena sifatnya yang lebih fleksibel dan sesuai dengan sifat dan skala usaha kecil. Selain itu Ashari (2006) menyatakan bahwa sektor pertanian di pedesaan yang mayoritas merupakan karakteristik usaha mikro dan kecil tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil-

kecil tetapi dalam unit usahanya yang sangat besar menyebabkan kurang terariknya lembaga perbankan formal yang besar untuk mendanai usaha mikro/kecil karena *transaction cost* nya sangat tinggi. Selain itu lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha mikro dan kecil sama

dengan usaha menengah dan besar yang mengacu pada persyaratan 5-C (*capital, character, capacity, collateral, condition*) yang dirasa sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasar tabel 8 diketahui bahwa nominal kredit tertinggi yang pernah diakses

Tabel 8. Rentang Nominal Kredit Tertinggi yang Diakses Masyarakat Piyungan

No.	Nominal Tertinggi (Rp.)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Lembaga Sumber Kredit
1	20.000.000,-	1	3,3	Bank
2	15.000.000,-	3	10,0	Bank
3	12.500.000,-	1	3,3	Bank

Sumber : Olahan data primer, 2009

oleh responden adalah Rp.20.000.000. dengan presentase hanya 3,3%. Jika dilihat dari lembaga sumber kredit dengan nominal tertinggi adalah kredit yang diakses pada perbankan. Konsisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di pedesaan lebih banyak berinteraksi dengan LKM dibanding dengan perbankan. Ini terkait dengan jenis usaha produktif yang ada di masyarakat pedesaan adalah merupakan usaha kecil,

dengan kapasitas produksi dan jangkauan pemasaran yang relatif terbatas. Ini sesuai hasil penelitian Indiasturi (2005) yang menyatakan selama ini LKM merupakan lembaga yang mampu untuk memenuhi modal bagi UMKM karena LKM mampu menyesuaikan pelayanan dengan karakter UMKM yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan komersial.

Tabel 9. Cara Responden Memperoleh Sumber Informasi Lembaga Sumber Kredit

No.	Sumber informasi	Jumlah	Persentase (%)
1	Keluarga	12	40,0
2	Aparatur pemerintah	17	56,7
3	Sekolah	9	30,0
4	Media massa	11	36,7
5	Teman / tetangga	30	100

Sumber : Olahan data primer, 2009

Memperhatikan tabel 9 diketahui bahwa sumber informasi tentang keberadaan Lembaga Keuangan yang dapat menyalurkan kredit di pedesaan paling banyak diperoleh melalui teman/tetangga. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa informasi tentang lembaga sumber kredit pernah diperoleh melalui teman / tetangga. Ini menunjukkan bahwa di masyarakat pedesaan sistem “getok tular” antar warga ternyata sangat efektif untuk menyampaikan informasi. Rangking kedua diduduki oleh aparat pemerintah, baik itu yang bersatatus PNS maupun non PNS (pamong desa). Sementara kedudukan paling rendah didapat dari sumber informasi yang

berasal dari sekolah. Ini jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden yang lebih dari 50% pada tingkat SLTP mempunyai kemungkinan kontribusi terhadap rendahnya peran sekolah dalam menyebarkan informasi tentang sumber kredit di bidang pertanian.

Berdasarkan wawancara yang mendalam kepada responden, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan lembaga sumber kredit yang akan mereka akses. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan mereka untuk memutuskan lembaga sumber kredit sesuai dengan hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 10. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan untuk Memutuskan Lembaga Sumber Kredit yang Akan Diakses

No.	Bahan Pertimbangan	Pilihan			Total
		Ya	Kadang- 2	Tidak	
1	Jarak lokasi sumber kredit dg lokasi tinggal	30	0	0	30
2	Adanya pengurus / nasabah yang dikenal	29	0	1	30
3	Jenis kredit yang ditawarkan sesuai kebutuhan	18	6	6	30
4	Besarnya balas jasa yang ditetapkan	29	0	1	30
5	Adanya agunan	28	1	1	30
6	Proses aplikasi peminjaman	29	0	1	30
7	Adanya informasi dari teman/rekan	29	1	0	30
8	Adanya pengembalian sebagian dari keuntungan	27	0	3	30
9	Biaya adminstrasi yang dibebankan pada nasabah	30	0	0	30
10	Faktor untuk menjalin komunikasi / silahturahmi	30	0	0	30
11	Bangunan / gedung yang bagus	2	2	26	30
12	Kecepatan proses pencairan / masa tunggu	29	1	0	30

Sumber : Olahan data primer, 2009

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa masyarakat di pedesaan masih mempertimbangkan faktor jarak lokasi tempat tinggal dengan sumber kredit. Alasan yang dikemukakan saat *indepth interview* adalah menyangkut dengan waktu yang mereka miliki dan sarana transportasi yang tersedia. Bagi masyarakat pedesaan yang sering memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama, “waktu” sangatlah penting dan menjadi bahan pertimbangan untuk memilih lokasi sumber kredit. Selain itu sarana transportasi yang tersedia untuk dapat menuju ke lokasi sumber kredit juga menjadi bahan pertimbangan, karena tidak semua responden memiliki sarana transportasi pribadi yang mendukung kemudahan menuju lokasi tertentu dan tidak semua responden bertempat tinggal di wilayah dekat pada akses sarana transportasi umum.

Faktor adanya pengurus atau orang yang dikenal juga menjadi pertimbangan bagi pemilihan lembaga sumber kredit. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri terhadap kemampuan mengakses sumberdaya secara mandiri masih perlu ditingkatkan. Berdasar hasil wawancara diketahui bahwa responden lebih merasa nyaman, aman dan percaya diri bila ada orang lain yang mereka kenal pada waktu melakukan interaksi dalam hal kredit, meskipun dalam hal ini tidak menjadi suatu pertimbangan apakah dengan

mengenal pengurus atau nasabah yang lain akan menjadi jaminan bahwa kredit yang diajukan akan dapat dicairkan.

Jenis kredit yang ditawarkan juga menjadi bahan pertimbangan responden untuk menentukan lembaga sumber kredit yang dipilih. Dengan melihat tabel 6 dimana kisaran kredit yang diambil rata-rata tertinggi berada pada kisaran Rp.150.000 – Rp.2.000.000,- maka responden lebih memilih untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan yang memberikan prosedur tidak rumit, biaya administrasi yang murah, melayani dalam jumlah sesuai kebutuhan serta masa tunggu pencairan tidak lama.

Pengembalian sebagian dari keuntungan ternyata juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sumber kredit yang akan dipilih. Selain itu sebagai masyarakat yang hidup di pedesaan struktur sosial mereka masih mengedepankan adanya unsur saling berinteraksi (silaturahmi) dalam menentukan lembaga sumber kredit.

Faktor perlu tidaknya agunan menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam menentukan lembaga sumber kredit yang diakses. Wawancara lebih lanjut pada responden menyebutkan bahwa mereka cenderung lebih memilih meminjam pada LKM karena tidak adanya persyaratan harus menyerahkan agunan. Bagi sebagian masyarakat syarat adanya agunan dirasa

cukup menyulitkan karena mereka kesulitan menyediakan. Agunan yang umumnya diminta berupa surat kepemilikan terhadap suatu barang. Lembaga keuangan yang ada di sekitar tempat tinggal umumnya jarang yang mempersyaratkan adanya agunan, karena lembaga-lembaga keuangan tersebut lebih mengutamakan prinsip saling percaya dan adanya sistem tanggung renteng. Disinilah adanya dimensi institusional yang sangat berbeda antara lembaga keuangan Perbankan dengan lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi (biasa disebut LKM), sehingga prosedur, tujuan program dan orientasi terhadap klien, persamaan perlakuan yang merupakan bagian dari dimensi institusional juga memiliki perbedaan. Perbedaan inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung memilih LKM sebagai lembaga sumber kredit, karena dari sisi institusional dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga aksesibilitas masyarakat di pedesaan terhadap LKM adalah tinggi.

Keindahan ataupun kemegahan bangunan yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lembaga sumber kredit. Hanya 6,7% responden yang mempertimbangkan bagus tidaknya bangunan yang dimiliki. Keyakinan akan keamanan suatu lembaga keuangan juga terkait dengan keamanan agunan yang biasanya

dipersyaratkan untuk dapat mencairkan pinjaman dalam jumlah yang relatif besar.

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ternyata selama ini LKM merupakan lembaga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan modal bagi UMKM karena LKM mampu menyesuaikan pelayanan dengan karakter UMKM yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan komersial. Sesuai dengan pendapat Ashari (2006) yang menyatakan peranan LKM pada pembangun ekonomi pedesaan yang masih didominasi sektor pertanian adalah sangat besar. Alasan yang dikemukakan antara lain adalah 1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan 2) proses singkat dan tanpa banyak prosedur 3) karakteristik usahatani umumnya membutuhkan plafond kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM 4) lokasi LKM dekat dengan nasabah memungkinkan pengelola LKM memahami karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan tepat jumlah, dan 5) adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi *moral hazard* dalam pengembalian kredit.

Dari tabel 11 diketahui bahwa 20% responden saja yang mampu menyebutkan sumber-sumber kredit yang berasal dari

Tabel 11. Pengetahuan terhadap Kredit Program yang Disediakan oleh Pemerintah

No.	Pengetahuan terhadap kredit program pemerintah	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)	Persentase (%)
		Pria	Wanita		
1	Mengetahui	4	2	6	20
2	Tidak mengetahui	13	11	24	80
	Total	17	13	30	100

Sumber : Olahan data primer, 2009

program pemerintah ataupun kredit kepedulian BUMN pada lingkungan yang dapat diakses untuk penuhi kebutuhan modal usahanya. Meskipun tingkat pendidikan responden rata-rata cukup tinggi, namun mayoritas masih belum mempunyai banyak informasi tentang kredit program yang dapat diakses untuk bidang pertanian. Rata-rata pemahaman mereka tentang sumber kredit yang ada di berbagai perbankan umum adalah kredit komersial, bukan kredit program pemerintah ataupun kredit program BUMN. Dari 20% responden yang mengetahui adanya kredit program pemerintah untuk bidang pertanian tidak ada satu orangpun yang

mengakses kredit program pemerintah. Namun demikian ada 16,7 persen yang berhasil melakukan akses pada kredit yang disalurkan melalui PKBL-BUMN, yaitu PKBL bank Mandiri dan PKBL PT. Jamsostek. Pertimbangan mereka tertarik dan mau berupaya meraih kredit PKBL dibanding dengan kredit program pemerintah terutama karena tingkat bunga yang ditawarkan sangat kompetitif, yaitu 6%/tahun dengan masa plafond maksimal Rp.20.000.000,-/individu dan agunan dapat ditanggung oleh salah satu anggota saja (tidak semua anggota kelompok harus menyerahkan agunan).

Tabel 12. Sebaran Frekuensi Interaksi Responden dengan Lembaga Sumber Kredit

No.	Frekuensi interaksi dengan sumber kredit (kali)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1	15	50,0
2	2	17	56,7
3	3	7	23,3
4	4	4	13,3
5	5	4	13,3
6	6	2	6,67
7	7	0	0
8	8	1	3,3

Sumber : Olahan data primer, 2009

Maksud dari frekuensi interaksi dengan sumber kredit adalah kekerapan seseorang melakukan interaksi pada suatu lembaga sumber kredit tertentu. Merujuk pada tabel 12, mayoritas frekuensi interaksi

seorang responden dengan lembaga sumber kredit adalah dua kali, inimencakup 56,7% responden. Interaksi paling tinggi mencapai delapan kali untuk satu lembaga keuangan, namun demikian kejadian tersebut hanya berlaku pada 3,3% responden.

Tabel 13. Penggunaan Kredit Yang Telah Diambil Oleh Responden

No.	Penggunaan Kredit Yang Diambil	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Mengembangkan usaha yg sudah ada	30	100
2	Memulai usaha lain / usaha baru	9	30
3	Menutup kerugian usaha yg lalu	4	13,3
4	Keperluan rumah tangga /konsumtif	5	16,7

Sumber : Olahan data primer, 2009

Merujuk pada tabel 13 diketahui bahwa seluruh responden memanfaatkan berbagai lembaga sumber kredit untuk berbagai macam keperluan, namun demikian pada prinsipnya seluruh responen menggunakan modal sendiri sebagai modal utama dalam menjalankan usahanya sedangkan modal yang bersumber dari luar, merupakan modal tambahan yang diperuntukan untuk mendukung usahanya. 100% kredit yang diambil responden diperuntukkan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Namun ada pula yang digunakan untuk mengembangkan usaha baru, yakni sebesar 30% dari responden. Pengembangan usaha baru biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah mapan dengan usaha yang telah dimiliki sebelumnya, dan biasanya penggunaan kredit untuk mengembangka usaha baru dilakukan oleh

mereka yang mempunyai akses kepada lebih dari satu sumber kredit sehingga kelancaran pembayaran angsuran kredit tidak menjadi kendala apabila usaha baru yang dikembangkan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Ada 13,3% dari responden yang menyatakan bahwa pernah menggunakan kredit yang diperoleh untuk menutup kerugian usaha yang lalu, dan 5% dari responden menyatakan menggunakan kredit yang diperoleh untuk keperluan rumah tangga. Ini merupakan konsekuensi dari kelonggaran persyaratan yang memang menjadi ciri khas berbagai LKM yang berkembang di masyarakat, sehingga pemanfaatan kredit yang diperoleh sering kali tidak mengharuskan untuk dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha. Namun demikian jika melihat perbandingan dari masing-masing distribusi kredit nampak

bahwa efektifitas pemanfaatan sumber kredit usaha masyarakat. dari LKM cukup tinggi dalam mendukung

Tabel 14. Kesiapan Responden Untuk Memanfaatkan Rencana Penambahan Modal

No.	Rencana Pemanfaatan Penambahan Modal	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Menyebutkan secara jelas renc. usaha & kebutuhan modalnya	16	53,3
2	Menyebutkan renc. usaha dan perkiraan kebutuhan modalnya	9	30,0
3	Belum mempunyai gambaran pasti tentang rencana pemanfaatan & kebutuhan modal	3	6,7
4	Membuka usaha lain (baru)	2	6,7
	Total	30	100

Sumber : Olahan data primer, 2009

Tabel 14 Menunjukkan bahwa 93,3% responden sudah mempunyai rencana yang jelas apabila mereka mendapat tambahan modal, dengan memperhitungkan kemampuan untuk mengembalikannya. Hanya 6,7% yang belum mempunyai gambaran tentang pemanfaatan kredit yang akan diambil. Sehingga dari sini dapat dijelaskan bahwa para responden adalah masyarakat yang produktif dan mampu merencanakan pengembangan usahanya secara jelas. Dan kebutuhan mereka terhadap lembaga sumber kredit yang dapat mereka akses sesuai kriteria yang mereka harapkan masih sangat diperlukan.

D. Karakteristik Skim Kredit Yang Diharapkan Masyarakat Pedesaan

Di wilayah kajian terdapat dua pola usaha yang berbeda, yaitu usaha yang bersifat

harian, artinya usaha yang langsung bisa memperoleh pendapatan pada hari itu juga dan usaha yang bersifat musiman, artinya usaha tersebut membutuhkan kurun waktu tertentu sebelum menghasilkan produk, maka untuk karakter skim kredit yang diharapkan masyarakat dipedesaan akan dibahas dari dua kelompok tersebut. Bagi masyarakat yang mempunyai usaha dengan hasil musiman seperti terangkum pada tabel 15.

Dari tabel 15 diketahui bahwa masyarakat di pedesaan menghendaki skim kredit yang diselenggarakan dengan model pengelolaan LKM. Dimana persyaratan dan prosedur yang digunakan dianggap tidak menyulitkan mereka. Untuk kredit yang diambil oleh usaha yang bersifat musiman, pada dasarnya mereka tidak keberatan dengan adanya agunan, selama agunan yang diminta

Tabel 15. Karakteristik Skim Kredit yang Diharapkan oleh Masyarakat

No	Karakteristik Kredit Yang Diharapkan	Jenis Usaha	
		Harian	Musiman
1	Jenis agunan	Tidak perlu	Tidak masalah selama tidak menyulitkan
2	Bentuk kredit	Uang tunai	Uang atau sarana produksi
3	Lama kredit	Jangka pendek	Jangka pendek
4	Cara pengembalian	periodik	Satu kali, diakhir produksi
5	Tingkat bunga / tahun (%)	12	6 - 12
6	Prosedur peminjaman	Sederhana	Sederhana
7	Lokasi sumber kredit	Dekat dgn tempat tinggal / usaha	Dekat dgn tempat tinggal

Sumber : Olahan data primer, 2009

tidak seketat yang diterapkan oleh perbankan selama ini. Mereka masih bisa menerima apabila agunan yang dipersyaratkan seperti pada pegadaian, yang mau menerima agunan berupa barang-barang, tidak harus surat kepemilikan terhadap suatu barang.

Dari sisi bentuk kredit, untuk usaha yang bersifat harian seluruhnya menyebutkan uang tunai sebagai bentuk kredit yang diharapkan, sementara untuk usaha yang bersifat musiman masih dapat mentolelir bentuk kredit yang berupa saprodi, meskipun pada dasarnya mereka lebih menyukai dalam bentuk uang tunai.

Jangka waktu pengembalian kredit, seluruh usaha yang bersifat musiman menghendaki pengembalian kredit dilakukan secara sekaligus, yaitu diakhir proses produksi (panen). Jika tidak dapat sekaligus diwaktu panen, mereka mengharapkan adanya

“masa jeda” atau *grass periode* sebelum diwajibkan untuk mengangsur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar paparan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat yang mengakses pada berbagai lembaga sumber keuangan di pedesaan mempunyai jenis pekerjaan, rentang umur, rentang pendidikan, dan pengalaman berorganisasi yang beragam. Dengan nominal pinjaman terbanyak berkisar Rp.500.000 – Rp.2.000.000,-
2. Lembaga sumber keuangan yang diakses masyarakat pertanian di lokasi penelitian terdiri dari : perbankan, koperasi, lembaga keuangan bukan koperasi.

Sedangkan lembaga keuangan yang paling banyak diakses adalah Lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi, sering disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang tidak berbadan hukum.

3. Lembaga keuangan berperan menyediakan modal usaha bagi masyarakat di pedesaan terutama untuk mengembangkan usaha yang sudah ada dan membuka usaha baru. Mayoritas frekuensi interaksi masyarakat pada satu Lembaga Sumber Kredit adalah sebanyak dua kali, dengan macam lembaga sumber kredit yang diakses sejumlah 5 jenis lembaga sumber kredit.
4. Model kredit yang diharapkan petani sedikit berbeda antara usaha yang bersifat harian dengan yang bersifat musiman. Mayoritas masyarakat mengharapkan pinjaman dengan tingkat balas jasa rendah, tidak menggunakan agunan dan mempunyai jangka waktu sebelum memulai angsuran (*grass periode*).

Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat disarankan :

1. Untuk mengantisipasi permasalahan yang tidak diinginkan maka berbagai lembaga keuangan mikro yang bergerak di masyarakat di pedesaan

hendaknya meningkatkan statusnya menjadi berbadan hukum.

2. LKM yang telah berkembang di masyarakat perlu meningkatkan permodalan yang dimiliki agar dapat menyalurkan pinjaman kepada nasabah dengan nilai yang lebih besar, sehingga LKM mampu menjadi penggerak perekonomian di wilayah setempat.
3. Skim kredit yang telah disalurkan hendaknya mengakomodir masukan dari para nasabah, sesuai dengan sifat usahanya selama tidak menimbulkan efek negatif bagi lembaga sumber kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Anonimous. 2007. *Kebijakan dan Strategi Nasional Untuk Pengembangan Keuangan Mikro*. <http://www.profi.or.id/ind/>
- Arikunto, Suharsini. Prof, Dr. 2006. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Jurnal “Analisis Kebijakan Pertanian” Volume 4. nomor 2. Juni 2006 : 146 – 164.
- Damandiri. *PENDAHULUAN*. <http://www.damandiri.org/file/ekoilha>

- [munbrawbab2.pdf](#). diakses 10 Februari 2009
- Direktorat Pembiayaan. 2004. Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro Untuk Sektor Pertanian (Pedoman Dan Kebijakan). Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Aksesibilitas.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Accessibilitywiki-2>. diakses 9 Februari 2009.
- Indiasturi, R. 2005. *Arti Tahun Keuangan Mikro Bagi Indonesia*.
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/08/0608.htm> diakses 9 Februari 2009.
- Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, 2007. *Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara – Sejarah Ringkas PKBL*.
- Krisnamurti. 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Pertanian Indonesia*. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
- Maryati, MC. 2001. *Statistik Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nasir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Martowijoyo, S. 2002. *Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun I. Nomor 5. Juli 2002.
- <http://pkbl.bumn.go.id/index/profil/id/1>.
- Nurmanaf, A. Rozany. 2007. *Lembaga Informal Pembiayaan mikro Lebih Dekat Dengan Petani*. Kurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 Nomor 2. Juni 2007. page ; 99 – 109.
http://www.pse.litbang.deptan.go.id/in_d/pdffiles/isu5-2a-pdf. diakses 9 Februari 2009.
- Retnadi, Djoko. 2003. Kunci Sukses Lembaga Keuangan Mikro, Pahami Karakteristik Orang Kecil. Harian Kompas. 13 Agustus 2003.
<http://www.kompas.com>
- Wijoyo, Wiloejo Wiryo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sitem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskina*. Jurnal “Kajian Ekonomi dan Keuangan” edisi khusus Desember 2005. Jakarta
-